



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE: STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

¹Alfiandi Pradana Yusuf, ²Fuady, dan ^{3*}Harris Purnama

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

*Corresponding author: harrisburnama@unida-aceh.ac.id

Abstract

The role of the Pidie Regency Financial Management Agency in the management of regional assets requires planning and administration, in which the plans include Formulating the Details of the Needs of the Regional Property in the form of goods standards, requirements and price standards, then the Procurement of Regional Property in the form of efficient, effective, transparent, open and competitive, then in administration in the form of bookkeeping, namely registration and bookkeeping, then inventory in the form of data collection and recording, and reporting in the form of Semester User Ruler Goods Report and Annual User Ruler Goods Report. But the fact is that there is still a lack of role of leadership employees in the knowledge that is from internal factors is still lack of employee knowledge, while external factors are still not good attitude of employees in carrying out their duties. Problem Formulation (1) How is the planning of regional property needs in the management of regional property at the Pidie Regency Financial Management Agency? (2) How is the administration of regional assets in the management of regional assets in the Pidie Regency Financial Management Agency? The purpose of this study is to: (1) To find out the management of regional property in the Pidie Regency Financial Management Agency in planning the needs of regional property. (2) To find out knowing the management of regional property at the Pidie Regency Financial Management Agency in administering regional property. By using a qualitative research method approach that is using triangulation techniques by means of observation, interviews, and document analysis. Results The administration of regional assets in the management of regional assets at the Pidie Regency Financial Management Agency has not yet been carried out, namely Bookkeeping, where employees still do not master registration and bookkeeping, and also on inventory, namely lack of coordination related to data collection and also employee negligence in recording goods.

Keywords: *Management, Goods, Regions.*

Abstrak

Peran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie dalam pengeolaan barang milik daerah diperlukan adanya perencanaan dan penatausahaan, yang mana perencanaan tersebut di dalamnya terdapat Merumuskan Rincian Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa standar barang, standar kebutuhan dan standar harga, kemudian Pengadaan Barang Milik Daerah berupa efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, kemudian pada penatausahaan berupa pembukuan yaitu pendaftaran dan pembukuan, kemudian inventarisasi berupa pendataan dan pencatatan, serta pelaporan berupa Laporan Barang Penguasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Penguasa Pengguna Tahunan. Namun kenyataanya yang ada pada pegawai pimpinan masih kurangnya peran pengetahuan yaitu dari faktor internal masih kurangnya pengetahuan pegawai, sedangkan faktor eksternalnya masih kurang baiknya sikap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Rumusan Masalah (1) Bagaimana perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie? (2) Bagaimana penatausahaan barang milik daerah dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie? Tujuan Penelitian ini untuk: (1) Untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie

dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah. (2) Untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie dalam penatausahaan barang milik daerah. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yaitu menggunakan teknik triangulasi dengan cara observasi, wawancara, dan analisa dokumen. Hasil Belum terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah dalam pengeolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie yaitu Pada Pembukuan yang mana pegawai masih belum menguasai tentang pendaftaran dan pembukuan, dan juga pada inventarisasi yaitu kurangnya koordinasi terkait pendataan dan juga kelalaian pegawai dalam melakukan pencatatan barang.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Barang, Daerah.*

1. Pendahuluan

Aset/ barang daerah merupakan suatu potensi ekonomi serta sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan apabila barang daerah dikelola dengan baik dan benar, akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Agar dapat mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik maka dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang efektif antar bidang. Dalam mendistribusikan tugas akuntabilitas ke masing-masing bidangnya, dibutuhkan pula pemimpin dengan kemampuan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan tugas agar tepat sampai ke setiap komponen dalam bidangnya. Dengan demikian keberadaan pemimpin di tempat mempengaruhi kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam hal pengamanan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.

Akan tetapi fakta empirik yang terjadi saat ini berbanding terbalik dengan aturan-aturan yang telah dicantumkan dalam Qanun tersebut, sebagian besar masih belum memahami aturan tentang pengelolaan barang milik daerah seperti terdapat beberapa perencanaan barang milik daerah yang belum didasari oleh standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sehingga menyebabkan pengadaan barang milik daerah yang belum efektif, efisien, transparan, terbuka dan bersaing.

Penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan pun belum sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Pembelian barang yang tidak tercatat dalam buku inventaris, barang-barang yang rusak yang dibiarkan begitu saja dan barang daerah dicatat tetapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah, atau terjadinya double pencatatan dimana barang berupa bantuan dari pemerintah pusat yang belum jelas serah terimanya namun telah dicatat sebagai aset tetap, pada pelaporan barang milik daerah pun masih terdapat banyak kendala seperti masih banyaknya pelaporan yang belum sesuai serta masih terlambatnya penyerahan pelaporan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah serta untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie dalam penatausahaan barang milik daerah.

2. Kajian Pustaka

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Mulyadi (2015:12),

implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 18 yang berbunyi (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja (Renja) SKPK; (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga; (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan; (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPK; (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan; (6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Kemudian Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 yang berbunyi (1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel; dan (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam teori organisasi yang merupakan wadah terdapatnya orang berkumpul dengan berbagai macam pekerjaan sehingga diperlukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik, disini perlu dilakukan desain organisasi yang ideal berhubungan dengan kegiatan koordinasi dari bermacam pekerjaan yang ada dalam organisasi.

Purwanto (2012: 1-3) menjelaskan kembali bahwa Untuk pemahaman suatu organisasi bukanlah semata-mata sebagai suatu entitas tunggal tetapi ia merupakan sebuah sistem yang terkait erat dengan lingkungan. Elemen utama dari struktur organisasi adalah diferensiasi yang merupakan proses pembentukan dan pengawasan pembagian kerja atau tingkat spesialisasi dalam organisasi, sedangkan integrasi merupakan proses menmgkoordinasi berbagai macam tugas, fungsi, dan divisi sehingga mereka dapat bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama.

Model dan kreteria sumber daya manusia sangatlah penting sebagai bagian dari suatu kebutuhan dalam pemerintahan, dimana perencanaan sumber daya manusia, sebagaimana diketahui dalam pengambilan suatu kebijakan pastinya ada kegiatan dalam kebutuhan, sebagaimana menurut sedarmanyanti (2016:131), Hal lain sebagaimana dikemukakan dalam Pace dan Faules (2015 : 2) menyebutkan sebagai bahwa Organisasi adalah suatu system tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak terwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan.

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie serta Penatausahaan barang milik daerah dalam pengeolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang selanjtnya akan dianalisis. Adapun pengertian dari analisis data menurut Sugiyono (2016: 335) adalah: Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, serta membuat kesimpulan sehingga agar dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Ada beberapa cara untuk memeriksa keabsahan data yaitu 1) Ketekunan Pengamatan, 2) Triangulasi Data. Untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data dari sumber lain, 3) Diskusi dengan teman sejawat. Namun, dalam penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada triangulasi data yaitu data dicek kebenarannya dengan membandingkan data dari sumber lain.

4. Hasil dan Pembahasan

Perumusan Rincian Kebutuhan Barang Milik Daerah

Merumuskan Rincian Kebutuhan Barang Milik Daerah

Berdasarkan wawancara dan observasi dari indikator Standar Barang yang telah dilakukan peneliti terhadap informan bahwa standar barang dalam perumusan rencana kebutuhan barang milik daerah cukup baik, hal tersebut standar barang yang disusun dilakukan berdasarkan survey harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dan observasi dari indikator Standar Kebutuhan yang telah dilakukan peneliti terhadap informan bahwa standar kebutuhan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada badan pengelolaan kabupaten pidie secara umum sudah baik, hal ini dikarenakan dalam merumuskan perencanaan barang milik daerah menggunakan aplikasi SIMDA BMD.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat diambil kesimpulan indikator Standar Harga yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan oleh telah sesuai dengan harga pasar yang ada dilapangan.

Dalam kesimpulan dari dimensi Merumuskan Rincian Kebutuhan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan telah melakukan persiapan harga melalui survey dengan sebaik mungkin.

Pengadaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Efisien terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan dalam pengadaan barang tersebut sangat diperhatikan mengenai anggaran yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Efektif terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan oleh dalam pengadaan barang pegawai harus dapat mempertimbangkan terkait barang apa saja yang memiliki fungsi yang sangat penting.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Transparan terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan oleh telah adanya aplikasi untuk mengelola barang.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Terbuka terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya situs website yang dapat di akses secara langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Bersaing terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan oleh para pegawai telah mempedomani peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh pimpinan daerah. Dalam kesimpulan dari dimensi Pengadaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik disebabkan telah memiliki aplikasi dalam melakukan pengelolaan barang.

Penatausahaan Barang Milik Daerah Dalam Pengeolaan Barang Milik Daerah

Pembukuan

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumen diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Pendaftaran terhadap Pembukuan yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Pidie masih kurang baik, hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Berdasarkan Kesimpulan Indikator diatas dapat diambil kesimpulan dimensi Pembukuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie masih kurang baik, yaitu pada Pendaftaran yang disebabkan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, khususnya dalam hal komunikasi. Dalam kesimpulan dari Pembukuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie masih kurang baik, hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan pegawai dalam hal pendaftaran dan pembukuan.

Inventarisasi

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Pendataan terhadap Inventaris yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie masih kurang baik, hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar pegawai terkait dengan pendataan barang yang akan di jadikan data. Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Pencatatan terhadap Inventaris yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie masih kurang baik, hal tersebut disebabkan kurang baiknya pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pencatatan barang. Dalam kesimpulan dari Inventarisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie masih kurang baik, hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi pegawai dalam melakukan Pendataan dan Pencatatan.

Pelaporan

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Laporan Barang Penguasa Pengguna Semesteran yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan pimpinan akan terus berusaha untuk dapat memaksimalkan penyusunan laporan barang. Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan kesimpulan indikator Laporan Barang Penguasa Pengguna Semesteran terhadap Pelaporan yang dilakukan oleh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan Laporan akan disusun dalam bentuk rekapitulasi belanja tahunan baik itu dalam bentuk belanja modal maupun belanja barang jasa. Dalam kesimpulan dari Pelaporan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie telah cukup baik, hal tersebut disebabkan baiknya peran pimpinan dan juga kesadara dari pegawai dalam menyusun pelaporan pengguna barang semesteran dan tahunan.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa telah terlaksananya Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam pengeolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie hal tersebut dapat dilihat dari sudah baiknya disusun dan dilakukan berdasarkan survey harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian pada Standar Kebutuhan disebabkan dalam merumuskan perencanaan barang milik daerah menggunakan aplikasi SIMDA BMD, dan pada Standart Harga disebabkan telah sesuai dengan harga pasar yang ada dilapangan, Kemudian Pada Pengadaan Barang Milik Daerah disebabkan oleh Efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, pada efisien yang disebabkan dalam pengadaan barang tersebut sangat diperhatikan mengenai anggaran yang tersedia, pada Efektif disebabkan dalam pengadaan barang pegawai harus dapat mempertimbangkan terkait barang apa saja yang memiliki fungsi yang sangat penting, pada transparan disebabkan oleh telah adanya aplikasi untuk mengelola barang, dan pada Bersaing disebabkan oleh para pegawai telah mempedomani peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh pimpinan daerah berupa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Di sisi lain, belum Maksimalnya dengan Baik Penatausahaan barang milik daerah dalam pengeolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie hal tersebut disebabkan pada Pembukuan yaitu pada pendaftaran yang disebabkan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, khususnya dalam hal komunikasi, dalam pembuatan pendaftaran komunikasi merupakan penyebab utama kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan pada pembukuan disebabkan kemampuan pegawai dalam menyusun pembukuan haruslah didasarkan dengan kemampuan

akan prosedur penyusunan serta ketelitian, hal tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh pegawai, Kemudian Pada Inventarisasi yaitu pada pada pendaftaran yang disebabkan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar pegawai terkait dengan pendataan barang yang akan di jadikan data, dan pada Pencatatan disebabkan kurang baiknya pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pencatatan barang, akan tetapi pada Pelaporan sudah cukup baik yaitu pada Laporan Barang Penguasa Pengguna Semesteran yang disebabkan pimpinan akan terus berusaha untuk dapat memaksimalkan penyusunan laporan barang, yang dilakukan adalah memberikan perintah untuk menyusun laporan barang tersebut dengan menentukan batasan waktu kepada pegawai, dan pada Laporan Barang Penguasa Pengguna Tahunan disebabkan Laporan akan disusun dalam bentuk rekapitulasi belanja tahunan baik itu dalam bentuk belanja modal maupun belanja barang jasa.

Daftar Pustaka

- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, A. E. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pace, R. W., & Faules. (2015). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Cetakan ke-21). Bandung: Alfabeta.